DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abna, Bachtiar dan Rajo Sulaiman. 2008, *Pengelolaan Tanah Negara Dan Tanah Ulayat*. Padang.

Anggito, Albi & Johan Setiawan. 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: Jejak.

D. Limbong. 2019, *Kajian Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Milik Perorangan Yang Berasal Dari Tanah Negara*.

Efendi, Junaidi. 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Pranada Media Grub.

Ghozali, Djoni Sumardi. 2019, *Hukum Pengadaan Tanah Di Indonesia: Pengaturan Dan Prosedur Serta Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Hemdi, Yola. 2020, *Rahasia Rumah Tangga Rasulullah SAW*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020.

Jayadi, Setiabudi. 2015, *Pedoman Pengurusan Surat Tanah Dan Rumah Beserta Perizinannya*. Yogyakarta: Buku Pintar.

Kementrian Agama RI. 2018, *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Sinergi Indonesia.

Listyaningrum N, Wibowo, F.S & Zarkasyih, H. 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Hal Terdapat Sertifikat Ganda Di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur*. Media Bina Ilmiah.

Pramukti, Angger Sigit & Erdha Widayanto. 2015, *Awas Jangan Beli Tanah Sengketa*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Qudamah, Ibnu. 2008, *Al-Mugni, Jilid VII, Terj*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Radhite Oryza Fea, Dyara. 2016, *Buku Pintar Mengurus Sertifikat Tanah Rumah Dan Perizinannya*. Yogyakarta: Buku Pintar.

Santoso, Urip. 2017, *Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang Dan Sifat Akta*. Jakarta: Kencana.

Sembiring, Julius. 2016, *Tanah Negara Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana.

Jurnal:

A.R, Hakim. 2017. "Lembaga Rechtsverwerking Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Di Indonesia." *Jatiswara* Vol. 27 No 5.

Alban Singirankabo, Uwacu dan Maurits Willem Ertsem. 2020. "Relations Between Land Tenure Security and Agricultural Productivity: Exploring The Effect Of Land Registration." *Journal Land* Vol. 9 No. 1.

Arja Kusuma, Dadi dkk. 2017. "Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Hak Yang Kuat." *Jurnal UIS Kajian Hukum dan Keadilan* Vol. 5 No. 2.

Bustomi, Abuyazid. 2014. "Kepastian Hukum Atas Sertifikat Tanah Sebagai Bukti Hak Kepemilikan" Volume 5 No. II.

Claudia Permata, Shirly Dkk. 2018. "Implementasi Putusan Hakim Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah." *Jurnal UIS Kajian Hukum dan Keadilan* Vol. 6 No. 3.

D.A, Mujiburohman. 2018. "Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) BHUMI." *Jurnal Agraria dan Pertanahan* Vol. 4 No.1

Kurniati, Nia dan Efa Laela Fakhriah. 2017. "BPN Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia Pasca Perkaban No. 11 Tahun 2016." *Jurnal Hukum* Vol. 19 No. 2.

Lubis, Taufik Hidayat. 2021. "The Legal Streangth Of The Deed Of Power To Sell As The Basis For Transfer Of Land Right." *Jurnal Reglement dan Society: Bunda Media Group* Vol. 2 No. 3.

Lumenta, Angelia Inggrid. 2018. "Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Terhadap Tumpang Tindih Kepemilikan Tanah" Vol. VI No. 7.

Manurung, Siti Hardianti Rukmana. 2017. "Strategi Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru Dalam Meminimalisir Permasalahan Tumpang Tindih Sertifikat Tanah (Overlapping) Di Kota Pekanbaru" Vol. 4 No. 7.

Nurhayati. 2019. "Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 3 No.1.

Nurhayati A. 2017. "Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Pokok Agraria." *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab* Vol. 5 No. 2.

Perdamean Parsaulin, Aggiat dan Sudjito. 2019. "Masalah Tumpang Tindih Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Kota Banjarbaru (Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN BJM)." *Jurnal Agraria dan Pertanahan* Vol. 5 No. 2.

Ramadhani, Rahmat. 2021. "Legal Protection For Land Right Holders Who Are Victims Of The Land Mafia." *Jurnal Reglement dan Society* Vol. 2 No. 1.

Subhan Lubis, Aldi. 2019. "Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta Terhadap Bidang Tanah Yang Tidak Memiliki Alas Hak." *Jurnal Doktrina: Journal of low* Vol. 2 No. 1.

Skripsi:

Dendi Saputra, Riki. "Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Yang Bersertifikat Ganda Menurut Aturan Pertanahan Nasional Di Wilayah Tangerang Selatan." UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

Haris, Abd. "Interpretasi Makna Zulm Dalam Perspektif Hadis Nabi Saw. (Kajian Tematik)." Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar, 2018.

Ivan Dermawan, Ridho. “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penerbitan Sertifikat Tanah.” Universitas Jember, 2019.

Saraswati, Clara. “Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Terletak Di Perbatasan Desa Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.” Institut Agama Islam Raden Intan, 2016.

Utama, Anshari. “Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah Oleh Badan Peternakan Nasional Tapanuli Tengah.” Universitas Sumatera Utara, 2019.

Google:

Gerrald and Katleen Hill. “*The People Law Dictionary*.” https://dictionary.law.com/Default.aspx?selected=1098. (3 Juli 2022)

Webster, Noah. *“Land Certificate.”* https://www.merriam-webster.com/dictionary/land certicate. (3 Juli 2022).

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara R.I Tahun 1945.* Jakarta.

Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang R.I Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.* Jakarta.

Republik Indonesia. 1960. *Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.* Jakarta.

Republik Indonesia. 1961. *Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya.* Jakata.

Republik Indonesia. 1961. *Peraturan Pemerintah R.I Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.* Jakarta.

Republik Indonesia. 1997. *Peraturan Pemerintah R.I Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.* Jakarta.

Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 Tentang Penerbitan Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*. Jakarta.

Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta.

Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Pemerintah R.I Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.* Jakarta.

Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.* Jakarta.

Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.* Jakarta.